



Hard Skill Dan Soft Skill Pada Distribusi Kinerja Pembangunan Ekonomi Daerah

Nirwan Umasugi¹, Abd. Rauf Wajo², Abu Sahman Nasim³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Ternate

Email: nirwan@iwan-ternate.ac.id¹, abd.raufwajo@iain-ternate.ac.id², abusahman@iain-ternate.ac.id³

Received 22-10-2024 | Revised form 27-10-2024 | Accepted 06-11-2024

Abstract

The purpose of this research is to ensure the economic distribution of local government and community welfare on economic distribution justice, which is related to Hard Skills and Soft Skills on the Performance of Regional Economic Development Distribution is very relevant in solving economic development problems in the region, which boils down to the distribution of prosperous human resource performance development minimizing poverty in the region. Qualitative descriptive research type. The paradigm used is the interpretative paradigm with a survey approach. While the subject in this study is the source of the data. Subject determination is Purposive Sampling, where informants are selected based on their level of involvement and mastery with the research problems and objectives. Data were collected through interviews and document review and then analyzed by compiling, connecting and reducing data. The results showed that; 1) The local government has great economic potential in the sectors of Agriculture, Forestry, Energy and Mineral Resources, Tourism, Marine and Fisheries, Trade, Economic Structure and Growth of GRDP, Education, Employment. Equitable regional development in the distribution of the economy that is progressing for prosperity and produces maximum production for the region, through clear economic distribution in the economic distribution portion as an effort to achieve the vision, mission, goals and objectives of the program set out in the regional strategic plan. The potential for regional economic development when viewed from Hard Skills and Soft Skills is still a lot that has not been managed. 2) The distribution of Soft Skills for regional economic development includes all planning, control, use, supervision and accountability activities. In carrying out the distribution of economic development, it is known that there is management power. Characteristics of local government control can be through the principle of profit sharing in economic distribution, through contracts; al-Musarakah, al-Mudharabah, al-Muzara'ah, and al-Musaqah for the development of equitable economic distribution.

Keywords: Hard Skills and Soft Skills, Distribution, Regional Economic Development

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjamin distribusi ekonomi pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat pada keadilan distribusi ekonomi, yang terkait dengan Hard Skill dan Soft Skill Pada Kinerja Distribusi Pembangunan Ekonomi daerah sangat relevan dalam memecahkan persoalan ekonomi pembangunan di daerah, yang bermuara pada distribusi pembangunan kinerja sumber daya manusia sejahtera meminimalisasi kemiskinan di daerah. Jenis penelitian diskriptif kualitatif. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretatif dengan pendekatan survei. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah sumber data. Penetapan subjek bersifat Purposive Sampling, dimana informan dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan dan penguasaannya dengan masalah dan tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengkajian dokumen kemudian dianalisis dengan cara menyusun, menghubungkan dan mereduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Pemerintah daerah memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor

Pertanian, Kehutanan, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Pariwisata, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Perdagangan, Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan PDRB, Bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan. Pembangunan daerah yang berkeadilan pada distribusi ekonomi yang berkemajuan untuk kemakmuran serta menghasilkan produksi yang maksimal untuk daerah, melalui distribusi ekonomi secara jelas pada bagian porsi distribusi ekonomi sebagai upaya capaian visi, misi, tujuan, dan sasaran program yang ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Potensi-potensi pembangunan ekonomi daerah bila dilihat dari Hard Skill dan Soft Skill masih banyak yang belum dikelola. 2) Distribusi Soft Skill untuk pembangunan ekonomi daerah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam menjalankan distribusi pembangunan ekonomi dikenal adanya kekuasaan pengelola. Karakteristik penguasaan pemerintah daerah dapat melalui prinsip bagi hasil (profit sharing) dalam distribusi ekonomi, melalui akad; al-Musyarakah, al-Mudharabah, al-Muzara'ah, dan al-Musaqah untuk pembangunan distribusi ekonomi yang berkeadilan.

Kata Kunci: Hard Skill Dan Soft Skill, Distribusi, Pembangunan Ekonomi Daerah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang kian berkembang secara pesat maka diperlukan cara- cara yang efektif untuk dapat menyeimbangkan antara teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) agar tidak ada ketimpangan maupun kesenjangan di masa mendatang. Adanya upaya-upaya dalam peningkatan sumber daya manusia di Indonesia seperti di bidang perbankan memiliki dampak yang baik yaitu banyak nasabah yang tertarik untuk menggunakan aplikasi *Mobile Beangking*, *Brimo*, *iB Hasanah Card* dan bahkan nasabah dari bank konvensional pun bersinerjik dengan Bank Syariah Indonesia. Karena Bank Syariah Indonesia menerapkan bebas denda keterlambatan karena bank sudah syariah, sehingga bank ingin menjalankan sistem perbankan sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh (Jelita, Abu Sahman Nasin, Nirwan 2022: 1).

Menurut Depdikbud dalam (Linda Azmy Azizi, 2015: 41), *Soft Skill* yaitu tingkah laku, sikap, dapat beradaptasi, dapat bekerja dalam *team*. *Soft Skill* adalah Ketrampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (*Interpersonal skills*) dan ketrampilan dalam mengatur dirinya sendiri (*Intrapersonal Skills*) yang mampu mengembangkan untuk kerja secara maksimal. Konsep tentang *Soft Skill* sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep yang selama ini dikenal dengan istilah kecerdasan emosional (*emotional intelligence*). Secara garis besar *Soft Skill* bisa digolongkan ke dalam

dua kategori : *intrapersonal* dan *interpersonal skill*. *Intrapersonal skill* mencakup : kesadaran diri (percaya diri, penilaian diri, sifat & preferensi, kesadaran emosional) keterampilan diri dan (perbaikan, kontrol diri, kepercayaan, kelayakan, manajemen waktu, proaktif, hati nurani).

Sedangkan *interpersonal skill* mencakup kepedulian sosial (kesadaran politik, mengembangkan orang lain, memanfaatkan keragaman, orientasi pelayanan, empati dan keterampilan sosial (kepemimpinan, pengaruh, komunikasi, manajemen konflik, kerjasama, kerja tim, sinergi) Kelemahan dibidang *Soft Skill* yaitu berupa karakter yang melekat pada diri seseorang. Butuh usaha keras untuk mengubahnya. Namun demikian *Soft Skill* bukan sesuatu yang stagnan. Kemampuan ini bisa diasah dan ditingkatkan seiring dengan pengalaman kerja. Ada banyak cara meningkatkan soft skill. Salah satunya melalui *learning by doing*. Selain itu *Soft Skill* juga bisa diasah dan ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar manajemen.

Hard Skill merupakan kemampuan yang mendefinisikan tentang kemampuan seseorang atau yang dilakukannya agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kompetensi hard skill adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya.

Hard skill juga dibutuhkan dalam bidang pekerjaan tertentu sederhananya *hard skill* seperti ilmu atau wawasan yang dipelajari semasa sekolah baik teori maupun keahlian teknis atau ilmu khusus yang diminati untuk dipelajari.

Menurut (N. Afif & Arifin, A. H., 2022: 50), yang menjelaskan bahwa *soft skill* merupakan bagian terpenting dari seorang mahasiswa yang notabene diluar pengetahuan formal atau teknis. *Soft skill* menjadi suatu keterampilan dan atribut penting saat ini untuk dapat mendukung keterampilan formal yang dimiliki seorang mahasiswa. *Soft Skill* adalah sebuah keahlian yang secara tersirat yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dan sangat berguna sekaligus menjadi pelengkap untuk keterampilan lainnya dalam hal *hard skill*, sehingga dapat berdampak secara maksimal.

Keberhasilan lulusan perguruan tinggi dalam karir ditentukan oleh dua faktor yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta *Soft Skill*. Penguasaan iptek diperlukan sebagai bentuk telah dikuasainya keahlian dan penguasaan *Soft Skill* agar cepat berhasil dalam persaingan dunia kerja. Menurut (Purwanto, 2021) Hampir semua bisnis saat ini menurut kombinasi yang tepat antara *Hard Skill* dan *Soft Skill*.

Beberapa pakar mengatakan bahwa penguasaan kemampuan *Soft Skill* belum sepenuhnya dikuasai oleh mahasiswa sehingga masih banyak lulusan sarjana yang belum terserap di dunia kerja. Kualitas hidup yang menentukan kesuksesan seseorang sering disebut sebagai *Soft Skill* mencakup kerja keras, eksekutor, jujur, visioner dan disiplin (Wardani, et. al, 2022). Sedangkan *Hard Skill* merupakan kemampuan intelektual yang dibutuhkan untuk menentukan berbagai aktifitas mental untuk berfikir, menalar dan memecahkan masalah (Deswarta, 2023). Adapun indikator *Hard Skill* yang ditentukan oleh ahli (Riyanto, et al, 2023) antara lain: 1) kemampuan teknis, 2) ilmu pengetahuan dan 3) ilmu teknologi.

Soft Skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Adapun indikator *Soft Skill* menurut Sarma yang dikutip oleh (Deswarta, 2023) yaitu; 1) Kemampuan komunikasi, 2) ketrampilan berfikir dan menyelesaikan masalah, 3) Etika, 4) Ketrampilan kepemimpinan, 5) Kecerdasan emosional.

Tiga strategi pembangunan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan adalah melalui distribusi pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan belanja negara, menurut (Sri Watarti, dkk, 2019: 25-26) strategi kesejahteraan ekonomi yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga komponen:

- a. Menjadikan pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi kesejahteraan ekonomi. Pertama, langkah menjadikan pertumbuhan bermanfaat bagi penduduk miskin merupakan kunci bagi upaya untuk menghubungkan penduduk miskin

dengan proses pertumbuhan, baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan wilayah dan kepulauan.

- b. Menjadikan perlindungan sosial bermanfaat bagi penduduk miskin. Penyediaan layanan sosial bagi penduduk miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swasta adalah hal mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Pertama, hal itu merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kesejahteraan di Indonesia.
- c. Menjadikan belanja pemerintah bermanfaat bagi penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk penduduk miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non pendapatan). Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Menurut (Mudrajat Kuncoro, 2000: 107), penyebab masyarakat tidak sejahtera selalu dalam kemiskinan antara lain:

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
- 3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Untuk itu, penelitian ini untuk menganalisis distribusi ekonomi pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat pada keadilan distribusi ekonomi, yang terkait dengan *Hard Skill* dan *Soft Skill* Pada Kinerja Distribusi Pembangunan Ekonomi daerah sangat relevan untuk dikaji dalam memecahkan persoalan ekonomi pembangunan di daerah, yang

bermuara pada distribusi pembangunan kinerja sumber daya manusia sejahtera meminimalisasi kemiskinan di daerah.

TINJAUAN LITERATUR

Hard Skill & Soft Skill

Menurut Arhamuwildan dalam Jurnal (Ni Kadek Sirnawati, 2014: 12-17), *hard skill* merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. *Hardskill* merupakan keterampilan teknis yang melekat atau dibutuhkan untuk profesi tertentu. *Hard skill* memiliki peran yang sangat penting untuk dikembangkan untuk bekal dalam dunia kerja. Maksud dari peran tersebut adalah seseorang akan melakukan sebuah pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan *hard skill* yang dia miliki.

Menurut (Aly, A., 2017: 18), *Soft Skill* adalah kemampuan yang sudah ada pada diri seseorang, tetapi dapat dikembangkan dan dimaksimalkan serta dibutuhkan dalam dunia pekerjaan sebagai pelengkap dari kemampuan *Hard Skill*.

Hard skill dan *soft skill* dalam Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk berupaya menyeimbangkan kesejahteraan antara dunia dan akherat. Hal ini seperti yang termuat pada QS Al- Qashash ayat 77, “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Pembangunan Ekonomi

Teori pembangunan ekonomi dari Rostow ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori Rostow ini dikelompokkan ke dalam model jenjang linear (*linear stages mode*). Menurut Walt Whitman Rostow dalam (Nelly Lestari

dkk, 2021: 113-128), bahwa proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 (lima) tahap, yaitu :

1. Masyarakat tradisional (*the traditional society*)

Masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitive dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun temurun.

2. Prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*)

Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri.

3. Tinggal landas (*the take-off*)

Pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.

4. Menuju kedewasaan (*the drive to maturity*)

Tahap menuju kedewasaan ini diartikan Rostow sebagai masa di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi moderen pada hampir semua kegiatan produksi. Dalam menganalisis karakteristik tahap menuju ke kedewasaan, Rostow menekankan analisisnya kepada corak perubahan sektor-sektor pemimpin di beberapa negara yang sekarang sudah maju.

Struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Peranan sektor industri semakin penting, sedangkan sektor pertanian menurun.

Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manajer

professional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha-pemilik.

Kritik-kritik terhadap industrialisasi mulai muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap dampak industrialisasi.

5. Masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*)

Pada tahap ini ada 3 macam tujuan masyarakat (negara) yaitu:

- a. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain.
- b. Menciptakan negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif.
- c. Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) menjadi meliputi pula barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.

Menurut (Suryawati Chriswardani, 2005: 4), mengatakan bahwa sumber dan proses pembangunan ekonomi dalam penyebab terjadinya kemiskinan yaitu:

- 1) *Policy induces processes*: kemiskinan terjadi karena pelaksanaan suatu kebijakan yang justru menyebabkan kemiskinan.
- 2) *Socio-economic dualism*: kemiskinan terjadi karena ekonomi dikuasai oleh kelompok sosial tertentu.
- 3) *Population growth*: kemiskinan terjadi karena pertambahan penduduk.
- 4) *Recources management and environment*: kemiskinan terjadi karena kesalahan dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan.
- 5) *Natural cycles and processes*: kemiskinan terjadi karena siklus alam.
- 6) *Marginalization of woman*: kemiskinan terjadi karena kaum perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja diberikan lebih rendah daripada laki-laki.
- 7) *Cultural and ethnic factors*: kemiskinan karena faktor budaya dan etnik.

- 8) *Exploitative intermediation*: kemiskinan terjadi karena keberadaan pihak yang memanfaatkan kondisi dan kebutuhan.
- 9) *Internal political fragmentation and civil state*: kemiskinan terjadi karena kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah dengan pengaruh politik kuat.
- 10) *International processes*: kemiskinan terjadi karena sistem internasional yang berlaku.

Kesiapan Kerja

Menurut (Angraini dan Ardias, 2021: 84) kesiapan kerja yaitu kemampuan yang harus dimiliki dalam diri individu untuk dapat langsung bekerja tanpa memerlukan masa penyesuaian diri yang memakan waktu dalam rangka penciptaan suatu produk atau penambahan nilai suatu sumber daya dengan hasil yang maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Disisi lain menurut (Setiawan & Yusnaini, 2021) kesiapan kerja mahasiswa merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa baik dibidang akademik secara kognitif, adanya keterampilan, perubahan sosial dan emosional secara matang untuk memasuki dunia kerja yang sesuai dengan kemampuan diri. Menurut peneliti dipahami bahwa kesiapan kerja adalah suatu masa seseorang telah siap secara fisik, mental, intelektual maupun skill untuk dapat memberikan kontribusinya di dunia kerja sembari mengembangkan kemampuan yang ada, serta sudah mampu dalam mengemban tanggung jawab untuk diselesaikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berupa kejadian/ fenomena/ gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. (Hengki Wijaya Umrati, 2020: 8).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, observasi pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data tersebut dapat diamati oleh penelitian. (Burhan Bungin, 2017: 144). Wawancara sebuah proses memperoleh keterangan antara pewawancara dengan

informen atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. (Burhan Bungin, 2017: 144). Dokumentasi, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. (Irwan Hermawan, 2019: 77).

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan terdiri dari: 1) Reduksi data (*data reduction*), 2) Penyajian data menyusun atau mengelompokkan setiap jawaban dari hard skill dan soft skill pembangunan ekonomi daerah, dan 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi secara induktif. (Burhan Bungin, 2008: 27) dan menguraikan data yang memiliki kesamaan dan perbedaan kemudian menganalisis di antara keduanya agar tidak tumpang tindih agar mengambil kesimpulan yang lebih akurat. (Sugiono, 2011: 98).

HASIL PENELITIAN

Contoh Kasus; *Hard Skill* dan *Soft Skill* Pada Pembangunan Ekonomi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor Pertanian, Kehutanan, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Pariwisata, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Perdagangan, Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan PDRB, Bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan.

1. Pertanian

Dari luas wilayah. Kepulauan Sula tercatat memiliki luas daratan **7.085,53 Km²**. merupakan tanah pertanian. Melihat potensi yang ada, maka sektor pertanian merupakan sektor yang patut mendapat perhatian lebih, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat pertanian sendiri. Terdapat beberapa jenis tanaman perkebunan di Kepulauan Sula, antara lain: jenis tanaman perkebunan kelapa adalah **31.329.00** ha, Kopi adalah **194,50** ha, Kakao adalah **2.022,00** ha, Jambu Mete adalah 3.262,00 ha, Pala adalah 1.777,00 ha, cengkeh adalah 3.351 ha, Sagu adalah 410,40 ha. (BPS Kepulauan Sula, 2023).

Pada tataran ini, *Hard Skill* dan *Soft Skill* keadilan distribusi pada ekonomi pertanian daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam meningkatkan kesejahteraan pembangunan

ekonomi masyarakat agar terpenuhi setiap kebutuhan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur penganggaran.

Menurut (Staf Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 2022), yaitu: Daratan kita ini (Kabupaten Kepulauan Sula) cukup luas, masyarakat mencari uang untuk kesejahteraan dengan bercocok tanam, tetapi dalam pengelolaan lahan pertanian belum optimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah, kita (Kabupaten Kepulauan Sula) masih mempunyai ketergantungan pada dana Pusat dana perimbangan yang sangat terbesar, maulumlah kita (Kabupaten Kepulauan Sula) punya potensi pajak dan distribusi daerah dan pendapatan lainnya kecil.

Dalam pembangunan ekonomi pada distribusi produksi, menurut (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2008: 156) memandang ekonomi Islam memiliki prinsip kepemilikan bersama yang berbeda, yakni: 1) kepemilikan pribadi (*private ownership*), 2) kepemilikan negara (*state ownership*), dan 3) kepemilikan publik (*publik ownership*).

Dilihat dari *Hard Skill Dan Soft Skill*, dapat dipahami bahwa; pembangunan daerah yang berkeadilan pada distribusi ekonomi pertanian yang berkemajuan untuk kemakmuran serta menghasilkan produksi yang maksimal untuk daerah, pemerintah daerah menerapkan pengembangan usaha pertanian melalui distribusi ekonomi, seperti menggunakan; *al- Muzara'ah* dan *al-Musaqah* secara jelas pada bagian porsi distribusi ekonomi sebagai bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran program yang ditetapkan dalam rencana strategis daerah.

2. Kehutanan

Salah satu fungsi hutan sebagai penyangga air dan udara bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30 persen dari total hamparan darat. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang ketuhanan.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Peta Paduserasi RTRWP dengan TGHK memiliki luas hutan 471.951,53 Ha, dengan rincian sebagai berikut; 1) Hutan Lindung 46.426,70 Ha; 2) hutan Suaka Alam 12.683,53 Ha; 3) Hutan produksi tetap 24.250,00 Ha; 4) Hutan Produksi terbatas 55.014,00 Ha; 5) Hutan produksi dapat di

konversi 281.007,70 Ha; dan 6) Areal penggunaan lain 52.499,60 Ha. (BPS Kepulauan Sula, 2020: 161).

Pembangunan ekonomi pada *Hard Skill* dan *Soft Skill* dalam pendistribusian merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial manusia dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Islam sebagai agama samawi dari Allah kepada manusia menyediakan berbagai tujuan fungsi hutan dalam rangka pembagian kepemilikan yang adil.

Tujuan yang terpenting dalam *Hard Skill* dan *Soft Skill* pada pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan oleh (Mohammad Anas Zarqa, 1992: 145-156), mengatakan sebagai berikut:

- 1) Garansi dari pemenuhan kebutuhan mendasar bagi seluruh manusia
 - 2) Sebagai Reduksi dari keseimbangan antara pendapatan dan kekayaan
 - 3) Scbagai pcmurnian/pembersihan dari diri dan harta kekayaannya.
 - 4) Generasi dari niat yang baik diantara manusia.
3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa indikasi sumber bahan galian golongan A,B dan gilongan C, yaitu tambang emas terdapat di Kecamatan Mangoli Timur (Desa Waitina dan Kawata), serta Kecamatan Sanana (Desa Wai Ipa) dengan perkiraan cadangan 10.400.000m. Tambang minyak dan gas terdapat di Kecamatan Mangole Barat (Desa Falabisahaya, Minaluli, Modopuhi, Modopia dan Saniahaya), Cekungan Sula (Memanjang dari perbatasan Kabupaten Banggai hingga sebelah Utara Pulau Mangoli).

Salah satu istilah teknis hukum Islam yang terkait dengan tanah dan tambang adalah *Iqtha'*. Dalam pembicaraan banyak fiqih kita menemukan pernyataan bahwa pemberian tanah ini atau tambang itu yang merupakan milik imam (daerah, pemerintah), dengan perbedaan di antara keduanya dalam batas-batas di mana Imam berhak melakukannya. Berkenaan dengan bahan mentah, misalnya seperti emas, menurut (Muhammad Baqir Ash Shadr, 2018: 230) ada kalanya akan lebih baik jika negara menggali sendiri sumber kekayaan tersebut dan menyediakan bahan-bahan itu dalam kuantitas yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, jika Imam (pemerintah) memandang bahwa negara tidak mungkin mengelola itu dalam kualitas yang sangat besar demi memenuhi kebutuhan masyarakat, maka imam/pemerintah bisa memilih cara produksi lainnya. Imam (pemerintah) bisa memberikan izin kepada para individu atau kelompok untuk mengeksploitasi tambang-tambang emas tersebut.

Jadi, dalam kasus sumber-sumber alam yang merupakan utilitas publik seperti ini, bila dilihat dari *Hard Skill* dan *Soft Skill* pemberlakuan *iqtha* dan pemberian hak kerja kepada individu merupakan perwujudan dari monopoli atau eksploitasi demi kepentingan diri sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *iqtha'* dalam Islam dan fungsi aslinya. Karena itulah syariah melarang hal ini dan membatasi *iqtha'* pada sumber-sumber alam yang memang membutuhkan kerja.

4. Urusan Pariwisata

Bidang pariwisata ditunjang dengan sejumlah obyek wisata, baik wisata alam maupun wisata sejarah. Obyek wisata alam yaitu pantai Wai Ipa, pantai Manaf di Kecamatan Sanana, taman laut Pagama di kecamatan Mangoli Timur, selat Capalulu di Kecamatan Mangoli Barat dan pantai desa Fatkauyon. Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula adalah 14 hotel, dimana di Kecamatan Sanana ada 10 hotel, dan di Kecamatan Mangoli Utara ada 4 hotel.

Jumlah Restoran yang ada di Kepulauan Sula sebanyak 28 restoran/rumah makan, 26 restoran/rumah makan berada di Kecamatan Sanana, 2 restoran/rumah makan berada di Kecamatan Mangoli Tengah. (BPS Kepulauan Sula, 2023).

Di tahun 2016, ada 19.200 wisatawan domestik yang mengunjungi Kabupaten Kepulauan Sula. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara, ada sebanyak 76 wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Kepulauan Sula. (BPS Kepulauan Sula, 2017). Sedangkan data di BPS tahun 2023 belum tergambar persentasinya.

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa, Pemerintah Daerah pada distribusi ekonomi pembangunan di daerah telah melakukan distribusi pengembangan ekonomi di tempat-tempat wisata lokal, seperti di Desa Fukweu dll.

Kearifan lokal pendapatan asli daerah (PAD) di daerah, PAD-nya sangat kecil, karena potensi-potensi kearifan lokal bila dilihat dari *Hard Skill* dan *Soft Skill* masih banyak yang belum dikelola. Pajak sebagai sumber pemasukan pemerintah ditetapkan melalui kebijakan yang digunakan untuk keberlangsungan belanja pemerintah daerah. Ini tidak mengutamakan keseimbangan pemasukan akibat adanya pinjaman publik atau hutang pihak ketiga yang menunjukkan bahwa pemasukan dan pengeluaran anggaran ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Sula tidak seimbang.

Menurut (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 2022) bahwa: Kearifan lokal kita (daerah Kabupaten Kepulauan Sula), potensi daerah Kita (Kabupaten Kepulauan Sula) belum banyak yang di perdayakan pengelolaannya dengan baik, langkah pemberdayaan juga dilakukan pemerintah bersama masyarakat di Desa Fukweu (wisata alam dan laut). Pariwisata alam ini (Desa Fukweu) sedikit menambah pemasukan kesejahteraan masyarakat. Kita (pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula) walaupun masih sedikit jumlah kearifan lokal yang di kelola, pemerintah berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat dan penambahan pemasukan PAD pengelolaan sumber daya kearifan lokal yang ada ini lebih di optimalkan lagi.

Dipahami bahwa kearifan lokal pendapatan asli daerah (PAD) di daerah, PAD-nya sangat kecil, karena potensi-potensi kearifan lokal bila dilihat dari *Hard Skill* dan *Soft Skill* masih banyak yang belum dikelola. Pajak sebagai sumber pemasukan pemerintah ditetapkan melalui kebijakan yang digunakan untuk keberlangsungan belanja pemerintah daerah. Ini tidak mengutamakan keseimbangan pemasukan akibat adanya pinjaman publik atau hutang pihak ketiga yang menunjukkan bahwa pemasukan dan pengeluaran anggaran ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Sula tidak seimbang.

Jadi, *Hard Skill* dan *Soft Skill* pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi berdasarkan pada asas efektif dan efisien terutama terkait dengan kondisi ekonomi daerah, dalam hal ini sumber-sumber pendapatan dan kearifan lokal lainnya diterapkan dalam *Hard Skill* dan *Soft Skill* pada ekonomi Islam dapat di perdayakan.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Usaha perikanan untuk kemajuan ekonomi pembangunan daerah adalah perikanan rakyat. Produksi perikanan sangat beragam dengan kesediaan potensi 80.547,81 ton per tahun dan potensi lestari sebesar 40.273,91 ton/tahun dengan standing stock pelagis (permukaan) 33.060,94 ton per tahun serta ikan demersal (dasar) 16.875,61 ton per tahun, pemanfaatan untuk kedua komoditas ini baru mencapai 11.506,53 ton per tahun atau 22,8 persen dari potensi lestari. Secara umum hasil produksi perikanan di dominasi oleh komoditas jenis ikan Cakalang, Layang, Madidhang dan Tuna.

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa, *hard skill* dan *soft skill* Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan perikanan untuk distribusi pembangunan ekonomi di daerah telah mengembangkan lokasi-lokasi untuk budidaya perikanan dengan pengembangan tempat-tempat budidaya ikan, seperti di Desa Bajo, Desa Fukweu dan Wainin.

Menurut (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Sula: 2022) bahwa: Budidaya ikan dengan pemanfaatan kearifan lokal kita (potensi daerah), sangat berpotensi dan lokasinya sangat strategis seperti di Desa Pohea, Desa Fukweu dan wainin. Bila di perdayakan dan pengelolaannya dengan baik dapat menambah pemasukan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan dapat mengubah perekonomian masyarakat lebih baik.

Bila di lihat dari *Hard Skill* dan *Soft Skill* Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan perikanan untuk distribusi pembangunan ekonomi di daerah telah mengembangkan lokasi-lokasi untuk budidaya perikanan dengan pengembangan tempat-tempat budidaya ikan, seperti di Desa Pohea, Desa Fukweu dan Wainin. Bila di perdayakan dan pengelolaannya dengan baik dapat menambah pemasukan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan dapat mengubah perekonomian masyarakat lebih baik.

Dengan komitmen untuk perubahan perekonomian masyarakat dalam pembngunan dapat terwujud, sebagaimana dikatakan oleh (M.Umer Chapra, 2006: 251-333), memberikan beberapa kebijakan yang perlu diambil dalam kerangka stabilitas dan

keadilan, ekonomi masyarakat yaitu; Individu mempunyai peran signifikan dalam pembangunan ekonomi. Individu perlu didorong untuk mau memberikan apa saja yang terbaik dengan bekerja keras dan efisiensi disertai dengan integritas, kejujuran dan disiplin.

Dipahami bahwa; Potensi kearifan lokal dapat didorong dengan komitmen *Hard Skill* dan *Soft Skill* Pemerintah daerah dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan pada distribusi ekonomi, untuk mendorong masyarakat memberikan yang terbaik maka dapat mencukupi kebutuhan, baik primer maupun sekunder.

6. Urusan Perdagangan

Jumlah pedagang yang terbanyak di daerah Sula yang terdaftar di dinas pengelolaan pasar berasal dari pedagang kecil sebanyak 157 pedagang. Dari 157 pedagang tersebut, semuanya berasal dari kecamatan Sanana. KUD dan Non KUD berjumlah 146, yang aktif 33 dan tidak aktif 113. (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM: 2019). Sedangkan pada tahun 2021-2022 Jumlah Koperasi yang aktif di Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 5 Koperasi. (BPS Kepulauan Sula, 2023).

Bila dilihat dari data dipahami bahwa setiap tahun koperasi selalu mengalami penurunan. Pemerintah daerah atau dinas terkait lebih intensif lagi mengawasi distribusi pada ekonomi koperasi, agar setiap perencanaan distribusi ekonomi terbuka bagi setiap pos-pos ekonomi lebih efisien pada manajemen distribusi ekonomi pembiayaan. Bila dilihat dari *Hard Skill* dan *Soft Skill* Pengawasan pada distribusi ekonomi dapat menguatkan nilai ekonomi proporsi koperasinya untuk kesejahteraan ekonomi bersama untuk kebutuhan setiap penduduk dan masyarakat di daerah.

Pembangunan dan distribusi untuk pengawasan manajemen ekonomi koperasi di daerah dapat meningkatkan nilai ekonomi koperasi, belum terealisasi bila dilihat dari *Hard Skill* dan *Soft Skill*, Untuk mengendalikan ekonomi sesuai sistem keadilan dan prosedur pemberdayaan, usaha kecil dan menengah (UKM) adanya beberapa keterbatasan kendala berupa, yaitu; 1) rendahnya kemampuan akses pada sumber

informasi, 2) rendahnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar, 3) rendahnya kemampuan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan termasuk perbankan, 4) rendahnya kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi, 5) rendahnya kemampuan dalam mengembangkan organisasi dan manajemen, 6) lemahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan antara sesama usaha kecil dan besar.

Persoalan koperasi dan UKM ini tidak terlepas dari sumberdaya penguatan pembangunan ekonomi, karena koperasi dan UKM merupakan salah satu pelaku riil dalam perekonomian. Sementara pada saat ini dapat dikatakan bahwa *Hard Skill* dan *Soft Skill* kedaan daerah dan bangsa Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, ada model kapitalisme atau mekanisme pasar yang menentukan semua aspek perekonomian, tentang apa yang diproduksi, kepada siapa dan bagaimana distribusinya, disisi lain ada model sosialisme yang merupakan ciri-ciri khas yang ada dalam beberapa kebijakan ekonomi yang masih ada di tangan pimpinan daerah/negara, sementara sistem ekonomi syariah masih mencari bentuk.

Bila dilihat dari *Soft Skill*, dapat dimaklumi bahwa daerah/bangsa kita saat ini masih jauh dari harapan, khususnya masih terjadi ketimpangan dari segala aspek kehidupan baik ekonomi, antar wilayah, maupun sosial dan hukum. Untuk itu dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi yang di anut bangsa Indonesia saat ini tidak mampu menyelesaikan masalah, terbukti orang miskin, lapangan pekerjaan tidak tercipta secara memadai sehingga pengangguran makin bertambah.

7. Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan PDRB

Bila dilihat dari Pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk di daerah dalam kurun waktu tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebanyak 105.293 jiwa, yang bersatus kerja 42.055 jiwa, yang bukan pekerja 63.238 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebanyak 8,36 jiwa. (BPS Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka: 2022).

Di tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebanyak 104.550 jiwa, yang bersatus kerja 42.528, yang bukan pekerja 62.022 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebanyak 7,64 jiwa. (BPS Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka: 2023).

Masalah kemiskinan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Meskipun demikian, masalah kemiskinan selalu aktual jadi perbincangan. Sebab kemiskinan telah berjuang puluhan tahun untuk membebaskan diri dari kemiskinan, kenyataan menunjukkan bahwa di Kabupaten kepulauan Sula belum dapat melepaskan diri belenggu kemiskinan.

Menurut (Kasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 2022), yaitu; Keterbelakangan dan kemiskinan terjadi karena keterbatasan sumberdaya ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat mengubah masyarakat menjadi sejahtera. Untuk keluar dari jeratan kemiskinan menuju kesejahteraan dapat ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, karena sumber daya ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat dapat mengantar masyarakat pada perubahan ekonomi yang sejahtera.

Dalam pembangunan ekonomi daerah pada distribusi sistem Ekonomi Islam, setiap orang dapat mencari sumber-sumber daya alam dengan benar dan jujur, pada konteks ini *Hard Skill* berperan penting termasuk bagaimana mengusahakan kenaikan hasil panen dan tangkapan ikan, sesuai dengan nilai wajar. Meskipun sumber-sumber daya tersebut telah diperoleh lewat cara-cara yang benar, tetapi tidak boleh dimanfaatkan kecuali menurut persyaratan yang amanat, disinilah *Soft Skill* dapat berperan penting, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat juga selain dirinya. Sifat mementingkan diri sendiri, tamak, dan tak mengindahkan moral atau bekerja untuk kepentingan diri sendiri bukanlah sifat yang harus melekat pada manusia sebagai pemegang amanah. Jika hal ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan perekonomian masyarakat, maka percepatan pemulihan ekonomi akan cepat diraih, sehingga angka kemiskinan semakin berkurang.

8. Bidang Pendidikan

Mengukur kualitas penduduk suatu daerah dapat dilakukan dengan mengetahui tingkat kemampuan dalam setiap individu dalam mengakses ilmu pengetahuan dalam rangka memperluas cakrawala ilmu dan wawasan berpikir. Oleh karena itu, landasan suatu masyarakat untuk dapat mengakses pengetahuan dimaksud dapat dilakukan antara lain dengan mengukur capaian bidang pendidikan setiap penduduk baik *Hard Skill* maupun *Soft Skill* yang dapat dicapai oleh suatu daerah/wilayah pada pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah siswa yang bersekolah di SD/MI sebanyak 110,80 persen siswa, yang bersekolah di SMP/MTs sebanyak 78,85 persen siswa, dan yang bersekolah di SMA/SMK/MA sebanyak 102,92 persen siswa. (BPS Kepulauan Sula Dalam Angka, 2022: 85).

Untuk pembangunan ekonomi pada distribusi ekonomi di bidang pendidikan dan kebudayaan pada nilai kecerdasan generasi daerah Kabupaten Kepulauan Sula sudah sesuai dengan kebijakan distribusi ekonomi daerah, yaitu: Pembangunan ekonomi pada pendidikan di daerah itu tentunya tidak ada masalah, sudah sesuai dengan kebijakan distribusi anggaran, misalnya dana Bos dan lain sebagainya.

Untuk pelaksanaan pendidikan berdasarkan pada *Hard Skill* dan *Soft Skill* untuk kualitas distribusi pembangunan nilai ekonomi pendidikan di daerah adalah proses yang dinamik dan dapat mencerdaskan generasi bangsa di daerah tidak ada akhirnya. Predikat distribusi ekonomi pemerintah ditentukan secara tetap dengan kondisi saat ini, belum tentu bertahan untuk kondisi beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, perlu diadakan pemeriksaan atau *review* yang lengkap terhadap nilai-nilai pendidikan pada *Hard Skill* ekonomi dan *Soft Skill* ekonomi daerah minimum sekali dalam tiga bulan.

Untuk peningkatan kualitas pendidikan, terkait dengan distribusi ekonomi dalam pembiayaan pemeliharaan pendidikan untuk sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Sula. Menurut (Kadis Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata: 2022), mengatakan bahwa; Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengajar (guru) di Kabupaten Kepulauan Sula ini masih minim, maka ada tahapan-tahapan pendorong misalnya tenaga pendidikan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3, dengan

beasiswa tapi terkait juga pada anggaran pemerintah daerah itu sendiri, dan di programkan oleh badan pendidikan kabupaten, dan disesuaikan dengan anggaran kabupaten, juga ada pelatihan-pelatihan untuk pendidikan daerah.

Dipahami bahwa; Sumber daya manusia berpendidikan, dapat memprediksi melalui kondisi distribusi ekonomi dalam pengembangan kualitas pendidikan *Hard Skill* pada saat ini, jangan hanya melihat pada kondisi perekonomian saat ini saja tetapi juga konsekuensi dan risiko yang dihadapi pada tiap alternatif *Soft Skill* keadilan distribusi ekonomi di daerah.

Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah mempunyai konsekuensi tertentu, maka pemahaman mengenai efek yang akan terjadi dari keputusan distribusi ekonomi pembangunan pendidikan yang diambil terhadap bagian dari kehidupan menjadi penting. Disinilah butuh pertimbangan nilai-nilai moral *Soft Skill* keagamaan dalam setiap keputusan yang menjadi kebijakan setiap pemerintah daerah.

9. Ketenagakerjaan

Setiap daerah/wilayah mempunyai angkatan kerja, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2021 adalah 42.055 jiwa yang terdiri dari orang yang berstatus kerja dan pengangguran. Sebanyak 39.994 jiwa yang berstatus bekerja dan 2.061 jiwa berstatus pengangguran. (BPS Kepulauan Sula Dalam Angka: 2022).

Sedangkan angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2022 adalah 42.528 jiwa yang terdiri dari orang yang berstatus kerja dan pengangguran. Sebanyak 41.636 jiwa yang berstatus bekerja dan 892 jiwa berstatus pengangguran. (BPS Kepulauan Sula Dalam Angka: 2023).

Pembangunan distribusi ekonomi pada pembiayaan tenaga kerja untuk kemakmuran masyarakat, pemerintah daerah dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal lebih mengarah pada pembangunan fisik infrastruktur penunjang kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Kasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sula: 2022), yaitu; Prorgam padatkarya 30% dari total anggaran dana desa yang menyangkut dengan fisik itu di distribusikan sebagai upah yang harus dibayarkan ke masyarakat. Padatkarya saat di evalusi oleh Pemerintah seakan tidak menyentuh langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama target sasaran; seperti pengangguran dan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, karena pekerjaannya tergantung musiman, distribusi ekonomi program Padatkarya diprioritaskan pada masyarakat tersebut.

Tenaga kerja pada pembangunan desa dan paradigma pembangunan semakin menegaskan tentang pentingnya aplikasi prinsip "tata pemerintahan yang baik" (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kerangka inilah *soft skill* diterapkan pada setiap pelaksana, penekanan dilakukan pada pembagian peran dan interaksi diantara tiga pelaku pembangunan di daerah, yaitu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Interaksi tersebut selanjutnya memberikan penekanan fungsi dan peran pada setiap pelaku pembangunan, yaitu:

- 1) Peran pemerintah dalam hal ini sebagai penyedia pelayanan publik (*civil servant*) dan katalisator yang menciptakan lingkungan kondusif (*enabling environment*) bagi pembangunan daerah,
- 2) Peran dunia usaha sebagai pencipta nilai ekonomis dalam kerangka mensejahterakan masyarakat setempat dengan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah,
- 3) Peran masyarakat sebagai pembentuk nilai sosial bagi pengembangan modal sosial (*social capital*) kehidupan masyarakat setempat secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Dipahami bahwa; distribusi pekerjaan pada masyarakat untuk keadilan ekonomi daerah dalam nilai kebutuhan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan untuk ukuran masyarakat di setiap daerah. Di setiap pemerintahan daerah untuk pembiayaan ekonomi melalui pengorganisasian anggaran dalam pendistribusian kekayaan dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, tetapi ada beberapa sektor perlu diperhatikan sesuai dengan *Soft Skill* kebutuhan masyarakat setempat di wilayah masing-

masing, seperti lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan Islam atau seminari untuk umat Kristiani, ini pun disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduk.

Pembangunan ekonomi pada sektor-sektor penting sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi sangatlah beragam, seperti bagaimana kita mendistribusikan seluruh pendapatan kita yang berkeadilan atau mulai perencanaan dan berinvestasi untuk keamanan ekonomi di masa yang akan datang, berdasarkan pada keadaan daerah, nilai-nilai dan kondisi ekonomi saat ini.

Dalam rangka mengurangi angka pengangguran yang ada, perlu menggunakan strategi baru yang memungkinkan untuk tertanggulangnya kemiskinan. Optimalisasi dan pemerataan Sumber Pendapatan Asli daerah sangatlah berpengaruh terhadap percepatan tujuan pembangunan.

Distribusi Kinerja *Hard Skill & Soft Skill* Pada Keadilan Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Distribusi Keadilan Kinerja Pembangunan Ekonomi

Dengan kekayaan yang berupa jumlah penduduk yang cukup banyak, yakni di akhir tahun 2022 berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula tercatat sebanyak 104.550 jiwa. Keadaan ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 892 jiwa, dengan demikian lahan pertanian dan begitu luasnya wilayah perairan daerah Kabupaten Kepulauan Sula sangatlah cukup dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang ada, hanya saja masalahnya Pemerintah Daerah dan masyarakat belum mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam ini.

Dalam rangka mengurangi angka pengangguran yang ada, perlu menggunakan strategi baru yang memungkinkan untuk tertanggulangnya kemiskinan. Optimalisasi dan pemerataan Sumber Pendapatan Asli daerah sangatlah berpengaruh terhadap percepatan tujuan pembangunan.

Pendekatan dalam memahami ruanglingkup ekonomi daerah dapat dipandang dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuannya, menurut (Muhammad Djumhana, 2007: 1), yaitu :

a) Dari sisi obyek.

Dari sisi obyek, yang dimaksud ekonomi daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam kerangka APBD. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b) Dari sisi subyek.

Subyek ekonomi daerah adalah mereka yang terlibat dalam pengelolaan distribusi ekonomi daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan perangkatnya, perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan daerah, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

c) Dari sisi proses.

Distribusi ekonomi daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pertanggungjawaban.

d) Dari sisi tujuan.

Distribusi ekonomi daerah meliputi keseluruhan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari penjelasan obyek, subyek, proses dan tujuan tersebut di atas pada dasarnya berada pada satu kegiatan yang disebut dengan distribusi keadilan ekonomi daerah.

Distribusi *Soft Skill* yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam menjalankan distribusi pembangunan ekonomi tersebut dikenal adanya kekuasaan pengelola. Pemegang kekuasaan mengelola distribusi ekonomi di daerah adalah gubernur/bupati atau walikota selaku kepala pemerintahan daerah.

2. Distribusi Ekonomi Islam pada Kinerja Pembangunan Daerah yang Berkeadilan

Pembangunan di daerah pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi keadilan distribusi p masyarakat dari suatu keadaan kepada suatu keadaan lain yang makin mendadaekati tatanan masyarakat yang sejahtera dan terhindar dari predikat orang miskin. Dalam proses tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1) pembangunan yang berkelanjutan (*contiuity*) dan 2) perubahan dinamika dalam perkembangan kebudayaan (Organization, 2020: 30). Keberlanjutan yang dipertahankan akan membuat kebudayaan bersifat statis, karena akan cenderung melawan (*resisten*) terhadap perubahan bahkan tertutup terhadap gagasan baru atau sistem ekonomi baru. Di pihak lain, perubahan tanpa keberlanjutan akan *Soft Skill* mengakibatkan suatu kebudayaan akan kehilangan jati dirinya.

Sejalan dengan jumlah orang miskin yang semakin mengecil, upaya kemakmuran menjadi lebih sukar dari sebelumnya. Ada dua alasan penyebab kondisi di atas, yaitu (1) kelompok target lebih sulit ditemukan diri sebelumnya, dan (2) perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berkurang dibandingkan sebelumnya, karena anggaran untuk keajahteraan masyarakat menjadi lebih mahal. Namun demikian, lantaran ideologi nasional dan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa semua rakyat Indonesia harus mendapatkan manfaat dari pembangunan, tidak peduli berapapun biayanya dan upayanya, kesejahteraan masyarakat harus tetap dilakukan (Asra, 2000:91).

Islam sebagai agama universal, mudah dimengerti dan dinalar *Soft Skill* didasari prinsip fundamental, yakni tauhid dan khilafah. Prinsip-prinsip ini merupakan embrio bagi terbentuknya sebuah strategi dalam mengatasi permasalahan masyarakat/umat, termasuk juga di dalamnya adalah kesejahteraan ekonomi. Sistem keadilan distribusi

Ekonomi *Soft Skill* Islam sebagai sebuah alternatif dalam kesejahteraan ekonomi menyiapkan prinsip ini secara matang (Mulyany & Furqani, 2019), yaitu:

a) Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid adalah sebagai pondasi *Soft Skill* keimanan dalam Islam. Semua strategi dalam mengatasi permasalahan baik dunia dan akherat bermuara pada tauhid. Tauhid mengandung arti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Allah swt dan ia tidak terjadi karena kebetulan saja, hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat Shad (38): 27). Segala sesuatu yang diciptakan-Nya memiliki suatu tujuan. Tujuan inilah yang akan memberikan arti dan signifikansi bagi eksistensi manusia merupakan salah satu bagiannya.

Untuk mewujudkan *Soft Skill* prinsip tauhid ini, Islam melarang riba dalam segala bentuk dari manifestasinya. Secara tauhid Allah swt sebagai pemilik sumber daya ekonomi, yang telah menentukan bahwa setiap kekayaan adalah untuk kepentingan semua manusia. Dalam kerangka transaksi dicerminkan pada pihak yang terkait, bukan hanya menjamin kepentingan satu pihak seperti pemilik modal atau financial.

b) Khilafah (Perwakilan)

Sesuai dengan kodrat manusia dimana kehadirannya di dunia ini sebagai khalifah (wakil) Allah, maka sesuatu yang esensi dari sisi kemanusiaan adalah bagaimana masyarakat/manusia bisa mengatur kehidupannya di muka bumi ini sekehendak hatinya (mukhayyr) akan tetapi tidak dalam artian menafikan keberadaan makhluk lain yang juga membutuhkan jiwa sosialnya. Dalam kehidupan yang penuh dengan cobaan ini, manusia dibekali oleh Allah swt dengan berbagai kelebihan untuk bisa menatap masa depan dengan penuh semangat dan tidak khawatir dengan berbagai kesalahan yang menimpah, asalkan dari berbagai aktifitasnya itu masyarakat/manusia selalu menggantungkan diri pada Allah swt untuk mendapat hidayah dalam menjalani perannya sebagai khalifatullah fi al-ardl. Bumi dan langit dengan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, demikian juga

apa-apa yang terdapat di dalam perut bumi merupakan benda-benda yang diciptakan oleh Allah swt. Tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Mulk (67): 15).

Bila di telusuri kembali, maka *Soft Skill* akan nyata bahwa sumber rizqi tersebut adalah Allah swt. Bila kita mengolah tanah pertanian, tanah yang kita olah dan air hujan yang diperlukan bagi hidupnya tanaman, merupakan bagian dari alam yang diciptakan oleh Allah swt. Demikian juga kalau kita mengusahakan pertambangan, tambang yang kita eksploitir merupakan isi bumi yang juga diciptakan oleh Allah swt. Jadi jelaslah *Hard Skill* dan *Soft Skill* kepada kita bahwa semua rizqi yang diperoleh umat manusia, semuanya berasal dari Allah swt. Dari filosofi kepemilikan semacam ini, Islam jauh-jauh sebelumnya telah mengatur; bahwa manusia bebas memiliki segala sesuatu yang sengaja oleh Allah swt dihidirkan di bumi ini, namun demikian ia juga harus ingat bahwa dirinya adalah seorang khalifah di bumi ini. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang dimilikinya itu merupakan harta titipan dari Allah swt untuk kemudian bagaimana manusia bias mentasorufkan harta itu sesuai dengan konsep-konsep amanah yang berlaku (Alizadeh Emamzadeh, 2020: 8).

Kebijakan pembangunan yang perlu diterapkan di daerah untuk kesejahteraan ekonomi adalah :

1) Penerapan sistem *profit sharing*

Karakteristik prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dalam distribusi ekonomi dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *al-Musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-Muzara'ah*, dan *al-Musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai dalam pertanian adalah *al-Muzara'ah* dan *al-Musaqah*. *Al-Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (sesuai kesepakatan) dari hasil panen. Sedangkan *al-Musaqah* adalah bentuk yang paling sederhana dari *Muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap memperoleh hak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Profit sharing ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan sistem bunga yang selama ini semakin membuat masyarakat menjadi miskin.

2) Memperluas jaringan bank syari'ah

Pengembangan *Hard Skill* jaringan bank syari'ah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Bank syari'ah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak memperbolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniawian) dan keagamaan *Hadr Skill* dan *Soft Skill*. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syari'ah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan syariah sebagai *Self Efficacy*.

Perluasan jaringan bank syari'ah ini dalam rangka mengurangi jumlah praktek bunga bagi lembaga-lambaga keuangan lain, atau para masyarakat yang mempraktekkan bunga di musyarakat. Perbankan syari'ah sangat menolak praktek riba sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi.

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, bank Islam dipraktekkan atas dasar konsep bagi untung dan bagi resiko. Dalam melaksanakan investasinya, bank Islam memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri serta dana lain yang tersedia untuk investasi, pembangunan ekonomi daerah mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syari'ah dan bermanfaat bagi masyarakat.

3) Memberikan motivasi kepada masyarakat

Sumberdaya alam yang melimpah, didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi belumlah cukup untuk bisa meningkatkan kemakmuran yang ada. Hal ini jika masyarakatnya memiliki budaya menerima apa adanya terhadap nikmat yang diberikan Allah, sementara bentuk usaha yang dalam peningkatan kesejahteraan mereka belum maksimal *Hard Skill* dan *Soft Skill*, berbagai bentuk penyuluhan perlu diberikan oleh aparat pemerintah daerah dalam rangka memotivasi masyarakatnya untuk berusaha maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam rangka

memenuhi kewajibannya sebagai khalifah Allah di bumi yang bertugas untuk mengelola ciptaan Allah ini.

KESIMPULAN

Dari hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, sesuai dengan teori dan analisis interdisipliner distribusi pembangunan ekonomi daerah yang ber-keadilan pada peningkatan kemakmuran masyarakat, dapat disimpulkan bahwa;

Pemerintah daerah memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor Pertanian, Kehutanan, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Pariwisata, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Perdagangan, Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan PDRB, Bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan. Pembangunan ekonomi daerah pada bidang-bidang tersebut bila di topang dengan kualitas *Hard Skill* dan *Soft Skill* yang mumpuni dalam pembangunan ekonomi untuk kemakmuran masyarakat pada keadilan distribusi ekonomi daerah yang adil telah memperbolehkan kepemilikan pribadi (*privale properly*) dengan ketentuan yang berkeadilan.

Namun pembangunan distribusi ekonomi daerah yang ber-keadilan menentukan cara memilikinya, dan mewajibkan sirkulasi distribusi kekayaan terjadi kepada masyarakat, mencegah terjadinya sirkulasi distribusi kekayaan hanya pada segelintir orang. Pendistribusian harta telah memberikan jaminan kebebasan, tetapi dengan aturan yang sesuai syari'at *self efficacy*, dengan tujuan untuk memelihara kesucian rasa pemilikan harta untuk keutuhan ekonomi keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, Linda Azmy. "Profil Kompetensi Hard Skill dan Kompetensi Soft Skill Siswa Jurusan Tata Boga di SMK N 3 Magelang Dalam Praktek Industri di Hotel", Fakultas Teknik, Universitas Yogyakarta, 2015.
- Alam. "Analisa Pengaruh Hard Skill, Soft Skill dan Motivasi Terhadap Kinerja Tenaga Penjualan Studi Pada Tenaga Kerja Penjualan PT.BUMIPUTERA Wilayah Semarang". Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomik dan Bisnis 2012.
- Afif, N., & Arifin, A. H. Kesiapan Kerja Mahasiswa Akuntansi Di Era Digital: Cukupkah Hanya Hard Skills? KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 14(1), (2022). 50–62. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.50-62>.
- Aly, A. Pengembangan Pembelajaran Karakter Berbasis Soft Skills Di Perguruan Tinggi. *Ishraqi*, 1(1), (2017). 18–30. <https://doi.org/10.23917/ishraqi.v1i1.2926>.
- Angraini, D. I., Murisal, & Ardias, W. S. Pengaruh Ketrampilan Komunikasi Terhadap Kesiapan kerja Lulusan Sarjana Sumatera Barat. *Al:Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 1, (2021).
- Asra, A. Poverty and inequality in Indonesia: Estimates, decomposition and key issues. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 5(1–2), (2000). <https://doi.org/10.1080/13547860008540785>.
- Alizadeh Emamzadeh, M. R. Analysis of economic convergence of Islamic justice in selected Islamic countries. *Journal of Economic Structures*, 9(1). (2020). <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00191-8>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka, 2022.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Chapra, M.Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Cet.ke- 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Chriswardani, Suryawati. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, artikel "Memahami kemiskinan secara multidimensional", 2005.
- Djumhana, Muhammad. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007).

Fitriyana, A. N., Kurjono, K., & Budi Santoso. the Influence of Self-Efficacy on Students' Work Readiness. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 2(2), (2021). 233–238. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v2i2.53.2008>).

Hermawan, Irwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Mhetode*, Cet. I, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019).

Jelita, Abu Sahman Nasim, Nirwan Umasugi, [Analisis Implementasi Bebas Denda Keterlambatan Pada iB Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Hasan Esa | Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi](#) , Jurnal [Al-Mizan Vol.8 No. 01 \(2022\)](#).

Kuncoro, Mudrajat. *Ekonomi Pembangunan Toeri Masalah dan Kebijakan*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000).

Kajian Akademis Organisasi Pengelola Keuangan Daerah, *Reformasi Organasasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Direktorat Jenderl Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2009).

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sula, Wawancara, tanggal 8 Juni 2022.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula, Wawancara, tanggal 10 Juni 2022.

Kasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sula, Wawancara, tanggal 9 Junii 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula, Wawancara, tanggal 5 Juni 2022.

Lesilolo, herly J. *DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH Herly Janet Lesilolo Dosen Pastoral Konseling Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Institut Agama Kristen Negeri Ambon Email: bunda_noa@yahoo.com A . PENDAHULUAN Dalam situasi masyarakat yang selalu berubah-ubah , ideal*. 4(2), (2018).

Lestari, Nelly. Putri Aisha Pasha, Merisa Oktapianti, Nnanda Oktariani, Hj. Heni Noviarita. “TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI”, *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Volume 2, No. 2, 2021.

Mulyany, R., & Furqani, H. Sharing Prosperity: Distributive Justice Framework in An Islamic Moral Economy. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 23(2), (2019). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/2289>.

Organization, I. L. *Poverty alleviation through social and economic transformation Paper prepared for the Employment Working Group under the 2020 Russian presidency of the BRICS*. September. (2020).

Pasal 6 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sinarwati, Ni Kadek. “Apakah Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Mampu Meningkatkan Soft Skills dan Hard Skills Mahasiswa?”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Jumanika*, Volume 3, No 2, Singaraja, Juni, 2014.

Suarjana, A. A. G. M. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Dalam Upaya Mewujudkan Integrasi Kompetensi Hard skill, Soft Skill Lulusan Akuntansi. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18(2), (2022). 125–137. <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i2.125-137>.

Setiawan, & Yusraini. Pengaruh Locus of Control dan Kompetensi Diri Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa IAIN Lhokseumawe. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6. (2021).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011).

Shadr, Muhammad Baqir Ash. *Our Economics*, terj. Yudi, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

Staf Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Sula, Wawancara, tanggal 8 Juni 2022.

Sumber Data: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sula, 2022.

Umrati, Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

U. I. Riau, “Deswarta 1* , Desy Mardianty 2 , Bowo 3,” 2023. [Online]. Available: <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>. di unduh tanggal 15 Februari 2024.

Watarti, Sri., dkk, *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. (Jakarta: The World Bank Office Jakarta, 2019).

W. Likhar and H. Purwanto, “ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI TICKETING HELPDESK ONLINE BERBASIS WEB: STUDI KASUS PT XYZ Weli Likhar 1 , Hari Purwanto 2 1,” 2021.

Wardani, D. K., & Mau, L. C. Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*. Vol.1, No.7 Mei 2022

Zarqa, Muhammad Anas. *Distributive Justice in Islam*, Lectures on Islamic Economics, Islamic Research and Training Institute IDB, Cet. I, (Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 1992).